

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

Oleh:

Zalfa Jiyan Halim¹

Yani Achdiani²

Sarah Nurul Fatimah³

Universitas Pendidikan Indonesia

Alamat: JL. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat
(40154).

Korespondensi Penulis: zjiyanhalim@upi.edu, yaniachdiani@upi.edu,
sarahnurulfatimah@upi.edu.

Abstract. *This research has two main objectives. The first is to analyze the challenges and intervention strategies implemented by social workers on homelessness. Second, it focuses specifically on homeless families with children. Based on 20 relevant scientific journals, a more in-depth analysis of the causes of homelessness and the role of social workers was conducted using the systematic literature review method. It was found that in the treatment process, social workers have acted as facilitators and advocates. The task includes linking homeless people to essential social services needed. The 'housing first' approach was found to be a highly effective intervention. However, there are still challenges that may be difficult to overcome such as very limited policy support, minimal budget, and stigmatization of the surrounding community. Collaboration from many sectors and community involvement in the program is needed. A holistic approach and effort is suggested in this study to bring about lasting change. The change in question creates social services for the city.*

Keywords: *Housing First, Homelessness, Intervention Strategy, Social Worker, Social Rehabilitation.*

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

Abstrak. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama adalah menganalisa tantangan dan strategi intervensi yang diterapkan oleh pekerja sosial atas masalah tunawisma. Kedua, fokus khusus kepada keluarga tunawisma dengan anak. Berdasarkan 20 jurnal ilmiah yang relevan, analisis lebih mendalam mengenai penyebab tunawisma dan peran pekerja sosial dilaksanakan dengan menggunakan metode tinjauan literatur sistematis. Ditemukan bahwa dalam proses penanganan, para pekerja sosial telah berperan sebagai fasilitator dan advokat. Tugas itu meliputi menghubungkan para tunawisma dengan layanan sosial penting yang diperlukan. Pendekatan ‘perumahan pertama’ dibuktikan sebagai intervensi yang sangat efektif. Namun, masih terdapat tantangan yang mungkin sulit untuk diatasi seperti dukungan kebijakan yang sangat terbatas, anggaran yang minim, dan stigma masyarakat sekitar. Kolaborasi dari banyak sektor dan keikutsertaan masyarakat dalam program ini sangat dibutuhkan. Usaha dan pendekatan menyeluruh menjadi saran yang dapat diambil dalam penelitian ini agar perubahan yang mencolok dapat dihasilkan dalam waktu yang lama. Perubahan yang dimaksud menciptakan layanan sosial untuk perkotaan.

Kata Kunci: *Housing First*, Tunawisma, Strategi Intervensi, Pekerja Sosial, Rehabilitasi Sosial.

LATAR BELAKANG

Masalah tunawisma adalah masalah sosial yang kompleks dan multidimensional, masih menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius, mengingat dampak buruknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga oleh masyarakat secara luas.¹ Fenomena ini, yang seringkali terlihat di wilayah perkotaan, menimbulkan berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Lebih dari sekadar tidak memiliki tempat tinggal tetap, tunawisma melibatkan ketiadaan akses terhadap keamanan, privasi, dan stabilitas yang fundamental untuk kesejahteraan hidup.

Kondisi tunawisma dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam individu maupun lingkungan eksternal. Faktor internal meliputi gangguan psikologis,

¹ Sudiarti, S., & Nasution, E. I. "Analysis of the role of social services in handling homeless beggars (Gepeng) in medan city(Case study of medan city social service)," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), (Mei, 2022) Hal.. 1-2

ketergantungan zat, serta minimnya keterampilan hidup dan motivasi². Di sisi lain, faktor eksternal yang dominan mencakup kemiskinan struktural, pengangguran, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau. Disintegrasi keluarga, seperti perceraian atau kekerasan domestik, juga teridentifikasi sebagai pemicu signifikan yang menyebabkan individu atau seluruh unit keluarga kehilangan jaring pengaman sosial dan pada akhirnya tempat tinggal.

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan tunawisma, pekerja sosial memegang peran krusial sebagai garda terdepan. Mereka bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan berbagai intervensi yang bertujuan tidak hanya untuk menyediakan kebutuhan dasar, tetapi juga untuk mendukung reintegrasi sosial dan peningkatan kualitas hidup tunawisma. Pekerja sosial berfungsi sebagai pendamping, fasilitator, dan advokat, yang menghubungkan individu tunawisma dengan berbagai sumber daya dan layanan yang tersedia³. Mereka juga berperan dalam mengidentifikasi akar masalah yang melatarbelakangi kondisi tunawisma dan mengembangkan strategi yang berorientasi pada solusi jangka panjang.

Meskipun demikian, upaya penanganan tunawisma oleh pekerja sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan. Stigma sosial yang melekat pada tunawisma seringkali menghambat proses reintegrasi dan penerimaan mereka di masyarakat. Selain itu, keterbatasan dukungan kebijakan, alokasi anggaran yang minim, serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan profesional menjadi kendala signifikan yang memengaruhi efektivitas program.⁴ Tantangan ini diperparah ketika penanganan melibatkan unit keluarga dengan anak-anak, yang memiliki kebutuhan lebih kompleks dan rentan terhadap berbagai risiko.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan sistematis terhadap literatur yang ada guna menganalisis tantangan dan strategi intervensi pekerja sosial dalam menangani keluarga tunawisma dengan anak-anak. Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan tunawisma pada kelompok

² Jahidin, A., "Model sistem rujukan gelandangan dan pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 6, no. 1, (2017), Hal 6

³ Jahidin, A., "Model sistem rujukan gelandangan dan pengemis di Camp Assesment Dinas Sosial DIY," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 6, no. 1, (2017), Hal 12-16

⁴ Salsabila, Q., Purba, G., & Saragih, S. E., "Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kota Tanjungpinang," *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 3(3), (Desember, 2022) Hal. 133-134

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

tersebut, mengeksplorasi beragam pendekatan intervensi yang diterapkan oleh pekerja sosial, serta membahas kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas program penanganan tunawisma, khususnya bagi Dinas Sosial di wilayah perkotaan seperti Kota Depok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kajian literatur sistematis (systematic literature review) atau sering disebut juga studi pustaka (library research) sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih secara strategis mengingat tujuan penelitian untuk mensintesis dan menganalisis informasi yang telah dipublikasikan secara luas mengenai tantangan dan strategi pekerja sosial dalam penanganan keluarga tunawisma dengan anak-anak. Metode ini memungkinkan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis data dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan berbasis bukti mengenai fenomena yang diteliti.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan seleksi artikel ilmiah yang relevan dari berbagai basis data akademik terkemuka. Sebanyak 20 artikel jurnal ilmiah yang telah diidentifikasi dan dirangkum dalam logbook penelitian menjadi fokus utama kajian ini. Kriteria inklusi untuk pemilihan artikel tersebut meliputi: (1) publikasi dalam jurnal ilmiah bereputasi, (2) topik yang secara langsung berkaitan dengan tunawisma, keluarga tunawisma, anak-anak dalam konteks tunawisma, peran pekerja sosial, strategi intervensi sosial, atau kebijakan sosial terkait tunawisma, (3) rentang tahun publikasi yang representatif (misalnya, 5-10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi terkini, atau rentang yang ditentukan jika ada perubahan signifikan dalam isu), dan (4) ketersediaan teks penuh artikel. Kriteria eksklusi diterapkan untuk menghindari artikel yang hanya membahas aspek tunawisma secara umum tanpa relevansi dengan peran pekerja sosial atau keluarga dengan anak, serta publikasi non-ilmiah.

Setelah artikel terkumpul, data diekstraksi secara sistematis menggunakan kerangka kerja tematik. Untuk setiap artikel, informasi kunci yang diekstraksi meliputi: tujuan penelitian, metode yang digunakan, sampel atau konteks penelitian, hasil atau temuan utama, serta implikasi praktis atau rekomendasi. Proses ekstraksi ini

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, perbedaan, dan celah informasi di antara berbagai studi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan sintesis naratif. Setiap temuan dari 20 logbook artikel dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi kategori dan sub-kategori yang muncul terkait dengan faktor penyebab tunawisma, peran dan strategi intervensi pekerja sosial, serta tantangan yang dihadapi. Temuan-temuan ini kemudian dikelompokkan dan disintesis untuk membangun argumen yang koheren dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Meskipun penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer langsung dari lapangan, relevansi temuan literatur dengan konteks Dinas Sosial Kota Depok dianalisis melalui diskusi dan inferensi berdasarkan karakteristik umum masalah tunawisma di perkotaan dan peran lembaga sosial.

Validitas temuan dalam penelitian ini didukung oleh penggunaan sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan proses sintesis yang transparan. Keandalan diperoleh melalui kajian ulang berulang terhadap setiap artikel dan konsistensi dalam interpretasi data. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang holistik dan multidimensional mengenai strategi penanganan tunawisma keluarga dengan anak, yang berlandaskan pada akumulasi pengetahuan dari berbagai penelitian sebelumnya..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Faktor-faktor Kompleks Penyebab Tunawisma pada Keluarga dengan Anak

Kajian literatur secara konsisten menunjukkan bahwa fenomena tunawisma, khususnya yang melibatkan unit keluarga dengan anak-anak, merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor multidimensional, baik dari dimensi internal maupun eksternal. Secara internal, beberapa studi mengidentifikasi adanya korelasi signifikan antara kondisi kesehatan mental dan ketergantungan zat dengan status tunawisma. Gangguan psikologis seperti depresi berat, skizofrenia, atau gangguan bipolar dapat secara substansial mengganggu kapasitas individu untuk mempertahankan pekerjaan, mengelola keuangan, atau menjaga stabilitas hubungan sosial, yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan tempat tinggal. Ketergantungan pada alkohol atau narkoba juga seringkali memperburuk situasi, menyebabkan individu kehilangan pekerjaan,

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

dihantui masalah hukum, dan teralienasi dari keluarga atau jaringan dukungan sosial, yang mengarah pada kondisi tunawisma yang kronis.

Di samping itu, faktor internal seperti rendahnya motivasi hidup, minimnya keterampilan adaptif atau keterampilan kerja, dan kurangnya pendidikan juga disoroti sebagai kontributor signifikan terhadap kondisi tunawisma. Keterbatasan pendidikan formal seringkali berujung pada terbatasnya peluang kerja yang tersedia, mendorong individu atau kepala keluarga ke dalam sektor pekerjaan informal dengan pendapatan yang tidak stabil dan rentan terhadap pemutusan hubungan kerja. Dalam penelitian mereka mengenai penanganan tunawisma melalui pendekatan *housing first*, secara implisit menunjukkan bahwa meskipun tempat tinggal adalah prioritas, banyak tunawisma yang masih memerlukan dukungan tambahan berupa pelatihan keterampilan. Sintesis temuan dari logbook yang relevan dengan jurnal tersebut mengindikasikan bahwa individu yang memiliki riwayat pendidikan rendah atau tidak memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan pasar kerja modern, cenderung lebih sulit untuk memperoleh dan mempertahankan pekerjaan tetap.⁵ Mereka mungkin hanya mampu mengisi posisi-posisi berupah rendah atau pekerjaan serabutan yang tidak menjamin keberlangsungan hidup dan pembayaran sewa. Keterampilan personal yang lemah, seperti manajemen keuangan yang buruk, kemampuan resolusi masalah yang kurang, atau ketidakmampuan untuk bernegosiasi dalam lingkungan kerja atau sosial, juga dapat memperburuk situasi. Hal ini membuat individu atau kepala keluarga kesulitan bersaing di pasar kerja yang kompetitif atau mengelola tekanan hidup yang kompleks, sehingga secara signifikan memperbesar risiko kehilangan tempat tinggal dan terjebak dalam lingkaran tunawisma.

Dari dimensi eksternal, kemiskinan dan pengangguran adalah faktor dominan yang secara konsisten muncul di hampir seluruh literatur yang dikaji. Struktur ekonomi yang tidak merata, sulitnya akses terhadap pekerjaan layak dengan upah minimum yang memadai, serta PHK massal, seringkali menjebak keluarga dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus.

⁵ Irena, A., Hertati, L., Hendarmin, R., & Romri, A., "Kulia kerja lapangan tematik mendukung MBKM mahasiswa Indo Global Mandiri mendampingi para tunawisma bertahan hidup pada perkumpulan SIKH di Australia Barat." *PORTAL RISET DAN INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(1), (September, 2022), Hal. 40-51.

Selain kemiskinan dan pengangguran, keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau juga memainkan peran krusial sebagai pemicu kondisi tunawisma. Sistem perumahan yang tidak memadai, kurangnya ketersediaan unit perumahan bersubsidi atau terjangkau, serta kenaikan harga sewa properti yang tidak proporsional dengan rata-rata pendapatan, secara langsung memaksa keluarga berpenghasilan rendah untuk hidup di jalanan. Tekanan ekonomi ini diperparah ketika keluarga tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai, menyebabkan penyakit kronis yang menguras finansial atau menghambat kemampuan bekerja.

Sebagai contoh spesifik, Dalam artikel yang berjudul "Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Singgah" oleh Fikriryandi Putra, Desy Hasanah St. A, & Eva Nuriyah H, menggambarkan secara detail bagaimana ketiadaan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga hingga mendorong mereka menjadi tunawisma. Dalam studi yang dilakukan, ditemukan bahwa ketiadaan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai berkontribusi signifikan terhadap kondisi anak jalanan dan keluarga mereka. Misalnya, anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang tepat mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan, yang mengakibatkan ketidakmampuan orang tua untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga berujung pada kehilangan tempat tinggal. Selain itu, kurangnya akses pendidikan yang terjangkau menyebabkan anak-anak terjebak dalam siklus kemiskinan, di mana mereka tidak hanya putus sekolah tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka di masa depan.⁶

Di sisi lain, disintegrasi keluarga merupakan pemicu signifikan lainnya yang menyebabkan keluarga kehilangan jaring pengaman sosial dan, pada akhirnya, tempat tinggal. Situasi seperti perceraian yang tidak diselesaikan dengan baik, terjadinya kekerasan domestik yang memaksa salah satu pihak atau seluruh keluarga meninggalkan rumah, atau kehilangan figur utama dalam keluarga akibat kematian, sakit parah, atau hukuman penjara, dapat secara tiba-tiba menghilangkan dukungan finansial dan emosional yang selama ini menopang keluarga. ¹ Studi tersebut mengidentifikasi bahwa

⁶ Fikriryandi Putra, Desy Hasanah St. A, & Eva Nuriyah H, "PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH," SHARE SOCIAL WORK JURNAL, 5(1), (2025) Hal. 52-55

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

konflik internal dan disfungsi keluarga yang berkepanjangan merupakan salah satu penyebab utama keberadaan tunawisma.² Konflik keluarga yang tidak terselesaikan tersebut menciptakan lingkungan yang tidak aman, sehingga individu atau seluruh keluarga merasa terpaksa untuk keluar dan mencari kondisi yang lebih baik, meskipun itu berarti hidup di jalanan⁷.

Terakhir, meskipun tidak selalu umum atau bersifat kronis, faktor bencana alam atau penggusuran paksa secara tiba-tiba dapat membuat sejumlah besar keluarga kehilangan tempat tinggal dan menjadi tunawisma. Kejadian seperti banjir, gempa bumi, atau bahkan kebakaran besar dapat menghancurkan properti dan mata pencarian dalam seketika. Demikian pula, penggusuran paksa untuk pembangunan infrastruktur atau revitalisasi perkotaan, tanpa kompensasi atau relokasi yang memadai, dapat secara instan mengubah status puluhan hingga ratusan keluarga menjadi tunawisma. Meskipun jurnal spesifik dalam koleksi yang dikaji tidak secara eksplisit membahas studi kasus bencana/penggusuran sebagai penyebab tunawisma, literatur umum mengenai faktor pemicu tunawisma secara luas mengakui peran dari peristiwa eksternal mendadak ini. Penting untuk dicatat bahwa meskipun sifatnya insidental, dampaknya sangat masif dan memerlukan intervensi darurat yang cepat untuk mencegah kondisi tunawisma menjadi permanen.

Peran Strategis Pekerja Sosial dalam Intervensi Penanganan Tunawisma

Pekerja sosial memegang peran sentral dan strategis dalam upaya penanganan tunawisma, dengan berbagai intervensi yang dirancang untuk mendukung reintegrasi dan peningkatan kualitas hidup individu serta keluarga. Berdasarkan kajian literatur, peran utama pekerja sosial teridentifikasi sebagai pendamping dan fasilitator. Dalam kapasitas ini, pekerja sosial berinteraksi langsung dan membangun hubungan terapeutik dengan individu dan keluarga tunawisma, membangun kepercayaan, serta membantu mereka mengidentifikasi kebutuhan dasar yang paling mendesak. Berbagai artikel menunjukkan bagaimana pekerja sosial secara aktif mendampingi tunawisma dalam mengakses bantuan

⁷ Sudiarti, S., & Nasution, E. I. "Analysis of the role of social services in handling homeless beggars (Gepeng) in medan city(Case study of medan city social service)," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), (Mei, 2022) Hal. 1-5

makanan, pakaian, dan fasilitas sanitasi dasar, yang merupakan langkah awal krusial untuk stabilisasi kondisi mereka.

Sebagai contoh, beberapa studi menguraikan bagaimana pekerja sosial di lapangan melakukan pendekatan awal dengan membangun rapport melalui dialog dan empati. Mereka kemudian mendampingi individu tunawisma dalam mengakses bantuan primer seperti makanan siap saji dari dapur umum, pakaian layak dari donasi, serta mengarahkan ke fasilitas umum untuk sanitasi diri. Pendampingan ini bukan sekadar penyaluran bantuan, melainkan juga proses edukasi dan motivasi agar individu tunawisma secara bertahap mau menerima intervensi lebih lanjut. Proses ini sangat vital untuk menciptakan landasan kepercayaan antara pekerja sosial dan klien, yang seringkali memiliki pengalaman negatif dengan otoritas atau masyarakat.

Peran fasilitator juga mencakup penghubungan individu dengan layanan yang lebih spesifik dan kompleks. Ini meliputi bantuan dalam pengurusan dokumen identitas (KTP, Akta Kelahiran anak), pendaftaran anak ke sekolah, akses ke fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit), hingga pendaftaran pada program jaminan sosial atau bantuan tunai. Misalnya, peran pekerja sosial dalam membantu keluarga tunawisma dengan anak dalam memperoleh akta kelahiran untuk anak-anak mereka, yang menjadi kunci akses ke pendidikan dan layanan publik lainnya, sangat ditekankan.

Pendekatan intervensi dalam rehabilitasi sosial mencakup berbagai strategi yang diterapkan oleh pekerja sosial untuk membantu individu dengan disabilitas mental. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian adalah "housing first", yang menekankan pentingnya stabilitas tempat tinggal sebagai langkah awal dalam proses rehabilitasi. Filosofi ini berargumen bahwa dengan menyediakan tempat tinggal permanen dan stabil terlebih dahulu, individu akan memiliki fondasi yang kuat untuk mengatasi berbagai masalah lain yang mungkin mereka hadapi, seperti kesehatan mental yang terganggu atau ketergantungan zat.

Stabilitas tempat tinggal memberikan rasa aman dan nyaman, yang sangat penting bagi individu yang sebelumnya mengalami ketidakpastian dan kesulitan. Ketika individu merasa aman di tempat tinggal mereka, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam program intervensi lainnya, seperti konseling, terapi, atau pelatihan keterampilan. Dengan demikian, pendekatan "housing first" tidak hanya membantu mengurangi

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

tunawisma, tetapi juga meningkatkan kemampuan individu untuk berfungsi secara sosial dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Selain itu, pendekatan ini juga mengakui bahwa masalah kesehatan mental dan ketergantungan zat sering kali saling terkait. Dengan memberikan tempat tinggal yang stabil, individu dapat lebih fokus pada pemulihan dan pengembangan diri, tanpa harus khawatir tentang kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, strategi "housing first" dapat dianggap sebagai langkah inovatif dan efektif dalam rehabilitasi sosial, yang berpotensi memberikan dampak positif jangka panjang bagi individu dan komunitas.⁸

Pendekatan "housing first" terbukti lebih efektif karena mengurangi hambatan birokratis dan persyaratan ketat yang sering ditemukan dalam program tradisional. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan model tradisional yang menuntut individu untuk mengatasi masalah mereka terlebih dahulu sebelum mendapatkan tempat tinggal, karena stabilitas tempat tinggal itu sendiri menjadi katalisator bagi proses pemulihan dan reintegrasi sosial.⁹

Intervensi lainnya termasuk pelatihan keterampilan hidup dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Banyak penelitian menunjukkan pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam membantu individu keluar dari tunawisma dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara jangka panjang. Selain itu, konseling dan dukungan psikososial juga diberikan untuk membantu individu mengatasi trauma, stres, dan masalah kesehatan mental yang mungkin mereka alami akibat pengalaman tunawisma. Pekerja sosial juga memfasilitasi program reintegrasi sosial untuk membantu tunawisma membangun kembali jaringan sosial dan ikatan komunitas.

10

⁸ Marina Rahayu, Hanikhatul Munawarah, Sriyani, Riry Eka Putri Septiani, Linni Turia Putri, Melinia Pratiwi, Yolgi Julianto, Ramadhanti Rizka, Vio Ateza Sembiring, & M.Irfan, "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM REHABILITASI SOSIAL PADA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI PANTI SOSIAL BINA LARAS PAMBELUM," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop*, 2(2), (2022) Hal. 14-19.

⁹ Sihombing, E. A. P., Yuliani, D., & Windriyanti, W., "Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di pulau jawa," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 2(2), (Desember, 2020) Hal. 152-153.

¹⁰ Irena, A., Hertati, L., Hendarmin, R., & Romri, A., "Kulia kerja lapangan tematik mendukung MBKM mahasiswa Indo Global Mandiri mendampingi para tunawisma bertahan hidup pada perkumpulan SIKH di Australia Barat," *PORTAL RISET DAN INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(1), (September, 2022) Hal. 40-51.

Tantangan dan Kendala dalam Penanganan Keluarga Tunawisma dengan Anak

Meskipun peran pekerja sosial sangat krusial, implementasi intervensi penanganan tunawisma, khususnya untuk keluarga dengan anak, tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang signifikan. Salah satu hambatan yang paling sering disebut dalam literatur adalah stigma sosial dari masyarakat. Stigma ini termanifestasi dalam bentuk pandangan negatif, diskriminasi, dan pengucilan yang menghambat proses reintegrasi tunawisma ke dalam komunitas. Pandangan bahwa tunawisma adalah hasil dari kemalasan atau pilihan pribadi seringkali mengabaikan faktor-faktor struktural dan sistemik yang mendasarinya, seperti kemiskinan, kurangnya akses layanan, atau masalah kesehatan mental.

Jurnal seperti "Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kota Tanjungpinang" oleh Salsabila, Purba, & Saragih (2022) dan "Manajemen strategi Dinas Sosial dalam menangani permasalahan tuna sosial di Kota Bekasi" oleh Santoso, Yulyana, & Aryani (2022) secara konsisten menunjukkan bahwa stigma masyarakat merupakan salah satu kendala utama yang mempersulit upaya pemerintah dan pekerja sosial. Stigma ini tidak hanya menghambat penerimaan program rehabilitasi, tetapi juga mempersulit tunawisma dalam mencari pekerjaan atau tempat tinggal yang layak, karena adanya penolakan atau prasangka dari calon pemberi kerja atau pemilik properti. Bagi keluarga tunawisma dengan anak, stigma ini dapat berdampak lebih parah, menyebabkan anak-anak diintimidasi atau diejek di sekolah, mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya, atau bahkan internalisasi rasa malu yang merusak kondisi psikologis mereka secara berkelanjutan. Akibatnya, proses pemulihan dan reintegrasi menjadi lebih kompleks dan membutuhkan upaya yang lebih besar dari pekerja sosial untuk membangun kembali harga diri dan kepercayaan diri klien.

Selain stigma sosial, pekerja sosial menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan kebijakan dan anggaran, yang menjadi kendala besar dalam efektivitas program. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan tunawisma masih cenderung parsial dan belum terintegrasi antar sektor. Dinas Sosial Kota Bekasi, misalnya, mengalami hambatan karena alokasi anggaran yang tidak optimal, yang berimbas pada kualitas layanan yang diberikan. Hal ini relevan pula di kota-kota lain seperti Depok, di mana beban masalah sosial tidak diimbangi dengan distribusi sumber daya yang memadai.

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

Tantangan lainnya adalah pada sumber daya manusia. Jumlah pekerja sosial profesional masih terbatas, dan beban kerja yang berlebihan membuat pendekatan yang ideal sulit dilaksanakan. Dalam hasil kajian literatur, ditemukan bahwa satu pekerja sosial sering kali menangani banyak kasus sekaligus, sehingga tidak memungkinkan untuk pendampingan yang personal dan berkelanjutan. Di sisi lain, kurangnya pelatihan berkelanjutan untuk menangani isu spesifik seperti trauma anak tunawisma, penyakit mental, dan reintegrasi keluarga juga menghambat efektivitas program sosial.

Kompleksitas kasus tunawisma pada keluarga dengan anak-anak menuntut perhatian khusus. Mereka tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Namun sayangnya, sering kali terjadi fragmentasi dalam penanganan karena kurangnya koordinasi antara lembaga yang berbeda. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi tidak terintegrasi dan kurang efektif.

Implikasi Pendekatan “Housing First” dan Kolaborasi Multisektoral

Salah satu pendekatan yang konsisten muncul dalam literatur sebagai strategi efektif adalah Housing First. Pendekatan ini mengedepankan hak atas tempat tinggal sebagai prioritas utama, tanpa syarat tambahan seperti rehabilitasi terlebih dahulu. Model ini memberikan stabilitas yang lebih cepat dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi keluarga tunawisma dengan anak-anak.

Namun demikian, pendekatan ini hanya akan efektif jika dibarengi dengan kolaborasi multisektoral. Pasaribu (2024) menekankan pentingnya governance kolaboratif antara pemerintah, organisasi sosial, komunitas, dan sektor swasta dalam penanganan gelandangan dan pengemis.¹¹ Peran pekerja sosial sangat penting sebagai jembatan antar sektor, termasuk dalam membangun jejaring dukungan seperti layanan kesehatan, pelatihan kerja, dan bantuan psikososial.

Tak kalah penting adalah peran masyarakat. Edukasi sosial tentang isu tunawisma dapat mengurangi stigma, memperkuat empati, dan membuka peluang integrasi sosial bagi individu yang terdampak. Logbook mencatat bahwa banyak intervensi berbasis

¹¹ Pasaribu, S., "Collaborative Governance dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam," *Progres: Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2(1), (2024) Hal. 119–126.

komunitas seperti program sukarelawan, bantuan pangan, dan penyediaan tempat tinggal sementara menjadi bagian penting dalam strategi berkelanjutan.

Pembahasan

Pembahasan ini menganalisis secara mendalam hasil kajian literatur yang telah disajikan, menyandingkan temuan-temuan mengenai faktor penyebab tunawisma, peran dan strategi pekerja sosial, serta tantangan yang dihadapi, dengan berbagai literatur lain yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan interpretasi yang lebih kaya terhadap dinamika tunawisma keluarga dengan anak dan mengidentifikasi implikasi praktis serta teoritis.

Analisis Multidimensi Faktor Penyebab Tunawisma

Temuan mengenai faktor-faktor penyebab tunawisma, yang mencakup dimensi internal seperti kesehatan mental dan keterampilan hidup, serta dimensi eksternal seperti kemiskinan dan keterbatasan akses layanan, selaras dengan kerangka teoretis ekologi sosial yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner. Teori ini menekankan bahwa perilaku dan kondisi individu tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, mulai dari interaksi paling dekat (mikrosistem) hingga sistem sosial yang lebih luas (makrosistem). Oleh karena itu, tunawisma tidak dapat dipandang sebagai permasalahan individu semata, melainkan sebagai hasil dari disfungsi atau kegagalan interaksi antarsistem tersebut.

Dalam konteks ini, berbagai jurnal yang dikaji mengungkap bahwa tekanan psikologis, trauma, dan masalah kesehatan mental berperan signifikan dalam memperbesar risiko terjadinya tunawisma. Studi pada rumah singgah menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami gangguan psikososial atau trauma masa kecil memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami ketidakstabilan tempat tinggal. Jika tidak ditangani, tekanan mental yang dialami anggota keluarga tertentu dapat menjadi beban tambahan yang memicu disintegrasi rumah tangga dan mengarah pada kehilangan tempat tinggal.

Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan intervensi yang tidak hanya fokus pada penyediaan kebutuhan dasar, tetapi juga mengintegrasikan dukungan psikososial, layanan konseling, dan stabilisasi mental keluarga. Intervensi yang mempertimbangkan dimensi mikro hingga makro dalam kerangka sosial-ekologis memungkinkan pekerja sosial untuk merancang solusi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

Di sisi lain, disintegrasi keluarga menjadi pemicu yang sering terlupakan. Konflik dalam rumah tangga, perceraian, atau kehilangan orang tua dapat menyebabkan anak-anak kehilangan tempat tinggal yang aman dan akhirnya terjerumus ke jalanan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak stabil memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami tunawisma sejak usia muda. Dalam konteks ini, penting bagi pekerja sosial untuk tidak hanya merespons ketika kasus sudah terjadi, tetapi juga melakukan pendampingan keluarga, mediasi konflik, dan upaya pencegahan melalui edukasi serta konseling.

Penanganan tunawisma pada keluarga dengan anak memerlukan pemahaman yang mendalam akan kompleksitas situasi. Kolaborasi lintas sektor, penyediaan layanan berbasis komunitas, dan keterlibatan masyarakat secara aktif akan menentukan keberhasilan program jangka panjang. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, intervensi hanya akan bersifat tambal sulam dan tidak menyelesaikan akar persoalan.

Peran dan Strategi Intervensi Pekerja Sosial: Antara Idealita dan Realita Kontekstual

Peran pekerja sosial sebagai pendamping, fasilitator, dan advokat, merupakan fondasi etika profesi dan praktik pekerja sosial. Mereka adalah jembatan vital antara individu tunawisma yang rentan dan sumber daya yang tersedia. Namun, implementasi peran ini di lapangan seringkali menghadapi realitas yang kompleks, terutama dalam konteks kota besar yang padat dan memiliki masalah sosial yang berlapis. Pekerja sosial bukan hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga memberdayakan klien dengan informasi dan keterampilan untuk mengakses layanan secara mandiri, sebuah proses yang membutuhkan kesabaran dan keahlian komunikasi yang tinggi.¹²

Pendekatan "housing first" secara konsisten diakui efektivitasnya, menandai pergeseran paradigma dalam penanganan tunawisma. Jika model tradisional seringkali menuntut individu untuk "siap" atau "layak" sebelum mendapatkan tempat tinggal, "housing first" berargumen bahwa tempat tinggal itu sendiri adalah prasyarat untuk stabilitas dan kemajuan. Keberhasilan implementasinya menggarisbawahi bahwa strategi

¹² Sihombing, E. A. P., Yuliani, D., & Windriyanti, W., "Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di pulau jawa," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 2(2), (Desember, 2020) Hal. 144

ini dapat diterapkan di konteks Indonesia, meskipun dengan adaptasi tertentu terhadap ketersediaan perumahan dan sistem pendukung pasca-perumahan. Bagi keluarga tunawisma dengan anak, "housing first" sangat krusial karena langsung menyediakan lingkungan yang stabil bagi tumbuh kembang anak, memungkinkan mereka kembali ke sekolah dan memutus siklus tunawisma dari generasi ke generasi. Implikasi implementasi "housing first" di Dinas Sosial Kota Depok, misalnya, akan memerlukan inovasi kebijakan yang berani, alokasi anggaran yang signifikan, serta kolaborasi kuat dengan pengembang perumahan dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan unit-unit perumahan terjangkau dan layanan pendukung yang komprehensif.¹³

Strategi intervensi lain seperti pelatihan keterampilan hidup, pendidikan vokasional, dan dukungan psikososial melengkapi pendekatan "housing first" dengan tujuan mencapai kemandirian jangka panjang. Dalam konteks penanganan tunawisma, peran pekerja sosial membantu menghubungkan klien dengan sumber daya yang dapat meningkatkan kapasitas mereka, mulai dari akses pendidikan formal, kursus keterampilan, hingga bantuan pencarian kerja. Pembahasan ini menguatkan bahwa intervensi tidak boleh berhenti pada penyediaan tempat tinggal, tetapi harus berlanjut pada penguatan kapasitas individu dan keluarga untuk mencegah mereka kembali ke jalanan. Integrasi program kesehatan mental dan pendidikan vokasional menjadi krusial untuk memastikan bahwa individu tunawisma tidak hanya memiliki atap di atas kepala, tetapi juga alat untuk membangun kehidupan yang stabil dan mandiri.¹⁴

Membingkai Tantangan dalam Konteks Lokal Dinas Sosial Kota Depok

Tantangan yang teridentifikasi dari kajian literatur, seperti stigma sosial, keterbatasan kebijakan dan anggaran, serta kurangnya SDM profesional, memiliki resonansi kuat dengan kondisi penanganan masalah sosial di berbagai daerah, termasuk Kota Depok. Stigma sosial, seperti yang diuraikan Salsabila, Purba, & Saragih (2022) di Tanjungpinang atau Santoso, Yulyana, & Aryani (2022) di Bekasi, bukan hanya menjadi

¹³ Irena, A., Hertati, L., Hendarmin, R., & Romri, A., "Kulia kerja lapangan tematik mendukung MBKM mahasiswa Indo Global Mandiri mendampingi para tunawisma bertahan hidup pada perkumpulan SIKH di Australia Barat," *PORTAL RISET DAN INOVASI PENGABDIAN MASYARAKAT*, 2(1), (September, 2022) Hal. 40-51.

¹⁴ Sihombing, E. A. P., Yuliani, D., & Windriyanti, W., "Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di pulau jawa," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 2(2), (Desember, 2020) Hal. 149-150

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

hambatan psikologis bagi tunawisma, tetapi juga memengaruhi kemauan politik dan dukungan publik terhadap program penanganan. Dalam konteks Depok, sebagai kota penyangga yang dihuni oleh masyarakat heterogen dengan dinamika sosial yang tinggi, stigma ini mungkin bervariasi dan memerlukan strategi komunikasi publik yang lebih terarah dari Dinas Sosial untuk mengedukasi masyarakat, membangun empati, dan mempromosikan inklusi sosial. Program-program advokasi dan kesadaran publik perlu dirancang untuk mengubah persepsi negatif menjadi dukungan aktif.

Keterbatasan anggaran dan dukungan kebijakan merupakan masalah yang secara konsisten muncul dalam berbagai kajian literatur. Banyak Dinas Sosial di daerah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program secara optimal karena alokasi dana yang tidak memadai dan regulasi yang belum berpihak secara penuh pada kelompok rentan. Dalam kondisi ini, inovasi seperti pendekatan housing first menjadi sulit diterapkan karena keterbatasan dukungan struktural dan keberlanjutan finansial.

Oleh karena itu, penting bagi instansi seperti Dinas Sosial Kota Depok untuk mengambil langkah strategis dengan mengadvokasi kebijakan yang lebih kuat, termasuk pembentukan peraturan daerah (perda) yang secara eksplisit mendukung penanganan tunawisma keluarga dengan anak. Inisiatif tersebut dapat mencakup pembentukan rumah perlindungan yang memadai, bantuan subsidi sewa, serta program reintegrasi keluarga yang terstruktur dan berkelanjutan secara anggaran.

Selain itu, tantangan besar juga datang dari keterbatasan sumber daya manusia profesional. Studi dalam logbook menunjukkan bahwa jumlah pekerja sosial sering tidak sebanding dengan beban kerja dan kompleksitas kasus yang dihadapi. Kasus tunawisma keluarga dengan anak mencakup persoalan yang multidimensi trauma psikologis, putus sekolah, hingga dinamika relasi keluarga yang disfungsional yang membutuhkan keahlian khusus dan pendampingan jangka panjang.

Langkah konkret yang bisa diambil adalah menjalin kemitraan strategis dengan institusi pendidikan dan lembaga pelatihan profesi untuk menyediakan kurikulum pelatihan yang relevan. Program pelatihan berkelanjutan ini dapat meningkatkan kapasitas pekerja sosial dalam melakukan asesmen, intervensi, dan pemberdayaan secara efektif. Selain itu, peningkatan rasio pekerja sosial terhadap klien sangat penting agar upaya intervensi tidak hanya bersifat darurat dan reaktif, tetapi juga proaktif, preventif, dan terarah pada pembangunan ketahanan keluarga jangka panjang.

Pentingnya Kolaborasi dan Pendekatan Holistik untuk Keberlanjutan

Pembahasan ini secara kuat menggarisbawahi bahwa penanganan tunawisma, khususnya keluarga dengan anak, memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Hasil kajian literatur yang menyoroti peran penting kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan komunitas (misalnya, Pasaribu, 2024 tentang Collaborative Governance di Batam) bukan sekadar idealisme, tetapi keharusan praktis. Dinas Sosial tidak dapat bekerja sendiri. Sinergi dengan dinas kesehatan (untuk layanan medis dan mental), dinas pendidikan (untuk akses sekolah anak-anak dan pendidikan non-formal), kepolisian (untuk perlindungan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi), serta sektor swasta dan organisasi non-pemerintah (untuk penyediaan sumber daya, peluang kerja, dan dukungan sukarela) menjadi esensial. Model collaborative governance ini memungkinkan pembagian beban dan sumber daya, serta menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan¹⁵.

Keterlibatan aktif komunitas juga merupakan komponen krusial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi. Program edukasi publik tentang isu tunawisma, yang menyoroti akar masalah dan bukan hanya stigmatisasi, dapat membantu mengurangi prasangka dan mempromosikan empati, membuka jalan bagi reintegrasi sosial yang lebih lancar. Masyarakat dapat berkontribusi melalui program sukarela, donasi, atau bahkan dengan membuka peluang kerja atau tempat tinggal yang terjangkau. Tanpa dukungan dari masyarakat, upaya pekerja sosial dan pemerintah akan selalu menghadapi tembok resistensi dan prasangka, yang menghambat keberhasilan program. Dengan demikian, keberlanjutan program penanganan tunawisma di Dinas Sosial Kota Depok akan sangat ditentukan oleh sejauh mana mereka dapat membangun ekosistem dukungan yang kuat, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya bersama yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Ini juga memerlukan evaluasi program secara berkala untuk memastikan efektivitas dan adaptasi terhadap dinamika masalah tunawisma yang terus berkembang.

¹⁵ Pasaribu, S., "Collaborative Governance dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam," *Progres: Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2(1), (2024) Hal. 122 & 139.

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif tantangan dan strategi intervensi yang diterapkan oleh pekerja sosial dalam menangani keluarga tunawisma dengan anak-anak, dengan fokus pada konteks yang relevan bagi Dinas Sosial Kota Depok. Berdasarkan analisis sistematis terhadap 20 jurnal ilmiah, penelitian ini menegaskan bahwa tunawisma pada keluarga dengan anak merupakan fenomena multidimensional yang berakar pada interaksi kompleks antara faktor internal (seperti masalah kesehatan mental dan minimnya keterampilan) dan faktor eksternal (termasuk kemiskinan struktural, pengangguran, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terjangkau). Disintegrasi keluarga dan peristiwa mendadak seperti bencana alam atau penggusuran juga teridentifikasi sebagai pemicu signifikan.

Dalam menghadapi kompleksitas ini, pekerja sosial terbukti memegang peran sentral sebagai pendamping, fasilitator, dan advokat, yang menghubungkan keluarga tunawisma dengan berbagai sumber daya dan layanan. Pendekatan "housing first" secara konsisten muncul sebagai strategi intervensi yang paling efektif, menunjukkan bahwa penyediaan tempat tinggal permanen terlebih dahulu adalah kunci untuk menciptakan stabilitas dan memfasilitasi reintegrasi. Namun, upaya penanganan ini dihadapkan pada tantangan berat, meliputi stigma sosial yang menghambat reintegrasi, keterbatasan dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah, serta minimnya sumber daya manusia pekerja sosial yang terlatih dan memadai. Pembahasan ini menggarisbawahi bahwa efektivitas intervensi sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang kuat dan keterlibatan aktif dari komunitas, yang semuanya harus dipertimbangkan dalam konteks spesifik Dinas Sosial di kota-kota besar seperti Depok.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam dengan melibatkan data primer, seperti wawancara langsung dengan pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Depok dan observasi program penanganan tunawisma keluarga dengan anak di lokasi tersebut. Penelitian di masa depan juga dapat fokus pada evaluasi efektivitas program "housing first" yang diadaptasi untuk konteks perkotaan Indonesia, serta mengkaji dampak jangka panjang intervensi pekerja sosial terhadap kesejahteraan anak-anak dari keluarga tunawisma. Selain itu, pengembangan model

kolaborasi yang optimal antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam penanganan tunawisma juga dapat menjadi area penelitian yang berharga.

DAFTAR REFERENSI

- A, G. P., Apsari, N. C., & Mulyana, N. (2019). Penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial, 1(3), 234. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20499>
- Bahlamar, A. R. U. (2023). Sidoarjo local government strategy in handling homelessness. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 11(2), 88–96. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v11i2.1752>
- Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta Indonesia, & Andari, S. (2020). Peran pekerja sosial dalam pendampingan sosial. Sosio Informa, 6(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2200>
- Bintang, C. R., Komeni, W. H., Azhari, R. A., & Bustani, S. (2024). Peran pemerintah dalam upaya penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis di kota jakarta. AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584), 4(02), 974–984. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5010>
- Ering, M., Bogar, W., & Mamonto, F. (2021). Implementasi program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (Rs-rtlh) di kota tomohon. Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara, 2(2), 32–39. <https://doi.org/10.53682/administro.v2i2.1686>
- Fikriyandi Putra, Hasanah, D. S. A., & Nuriyah, E. H. (2025). Pemberdayaan anak jalanan di rumah singgah. Share Social Work Jurnal, 5(1), 52–55.
- Fitriani, Y., Mirnawati, M., Anzani, R. D., & Dewanti, A. A. (2024). Collaborative governance dalam tata kelola pekerja migran indonesia di era society 5. 0. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 5(3), 255–264. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i3.183>
- Hadi, S., Imsiyah, N., & Alkornia, S. (2019). Efektifitas program pendidikan nonformal terhadap pemberdayaan gelandangan dan pengemis di lingkungan pondok sosial kabupaten jember. Learning Community : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 3(1), 27. <https://doi.org/10.19184/jlc.v3i1.13530>

TANTANGAN DAN STRATEGI PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KELUARGA TUNAWISMA DENGAN ANAK-ANAK

- Ibnu Santoso, B., Yulyana, E., & Lina Aryani. (2022). Manajemen strategi dinas sosial dalam menangani permasalahan tuna sosial di kota bekasi(Studi pada penanganan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 213–223. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2699>
- Irena, A., Hertati, L., Hendarmin, R., & Romri, A. (2022, September). Kuliah kerja lapangan tematik mendukung MBKM mahasiswa Indo Global Mandiri mendampingi para tunawisma bertahan hidup pada perkumpulan SIKH di Australia Barat. *Portal Riset dan Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 40–51.
- Jahidin, A., & -, S. (2017). Model sistem rujukan gelandangan dan pengemis di camp assesment dinas sosial diy. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 39–54. <https://doi.org/10.15408/empati.v6i1.9781>
- Makky, K., Rahman Hakim, A., & Asto Aji An'amta, D. (2023). Peran dinas sosial dalam mendampingi masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (Ppks) di kota banjarbaru. *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 42–51. <https://doi.org/10.20527/hjs.v2i1.37>
- Maryatun, M., Tri Raharjo, S., & Muhammad Taftazani, B. (2022). Kebijakan penanganan gelandangan pengemis berbasis panti untuk keberfungsian sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial(Ppks)(Studi pada panti pelayanan sosial pengemis gelandangan orang terlantar mardi utomo semarang). *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 103–117. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i2.5208>
- Merlindha, A., & Hati, G. (2015). Upaya rehabilitasi sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di provinsi dki jakarta. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 16(1). <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v16i1.67>
- Pasaribu, S. (2024). Collaborative governance dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Batam. *Progres: Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2(1), 122–139.
- Pratama Afjan, W. Y., & Hayat, H. (2023). Implementasi peraturan daerah no 9 tahun 2013 tentang penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis(Studi pada dinas sosial kota malang). *Journal Publicuho*, 6(2), 549–559. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.156>

- Rahayu, M., Munawarah, H., Sriyani, S., Septiani, R. E. P., Putri, L. T., Pratiwi, M., Julianto, Y., Rizka, R., Sembiring, V. A., & Irfan, M. (2022). Peran pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas mental di Panti Sosial Bina Laras Pambelum. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Pandohop*, 2(2), 14–19.
- Salsabila, Q., Gabriela Purba, & Selvia Evayanti Saragih. (2022). Peran dinas sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kota tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3(3), 132–141. <https://doi.org/10.46730/japs.v3i3.85>
- Sihombing, E. A. P., Yuliani, D., & Windriyanti, W. (2020). Pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis di balai rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di pulau jawa. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 2(2). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i2.310>
- Sudiarti, S., & Nasution, E. I. (2022). Analysis of the role of social services in handling homeless beggars (Gepeng) in medan city(Case study of medan city social service). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3). <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3.610>
- Tenri, A. (2021). Peran dinas sosial dalam penanganan odgj (Orang dengan gangguan jiwa) kecamatan polewali kabupaten polewali mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 179. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2154>
- Ulumudin, A., Juliasih, L., & Kurniawan, A. (2021). Evaluasi program penanganan gelandangan dan pengemis di kabupaten garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 12(1), 52–65. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v12i1.122>